Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20
November 2015
Purwokerto

**Respons sekolah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi tentang Sikap
dan Pendisiplinan Sekolah terhadap Siswanya yang Berkonflik dengan Hukum)**

Oleh:

Tri Wuryaningsih¹, Ratna Dewi², FX. Wardiyono³

Jurusan Sosiologi FISIP UNSOED

Triwury@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan respons sekolah terhadap siswanya yang berkonflik dengan hukum. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa sekolah yang direpresentasikan oleh para guru belum memahami hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena tidak satu pun dari guru tersebut pernah membaca undang-undang itu. Namun demikian, para guru tersebut menyatakan bahwa anak harus mendapatkan hak atas pendidikan. Sekolah menganggap bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut disebabkan lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan yang buruk. Terhadap anak-anak tersebut, sebagian sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari sekolah. Alasannya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan kenakalan terhadap anak yang lain. Beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat, dan beberapa sekolah lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya.

Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum, respons, sekolah, pendisiplinan

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain schools response toward their children in conflict the law. The findings show that schools represented by the teachers do not comprehend the basic rights of children included in Children Protection Act since none of

Prosiding Seminar Nasional

"Pembangunan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

them have read it. Nevertheless, they stated that the students must obtain their right for education. The schools claimed that the the children in conflict with the law are possibly caused by poor supervision of parents and environment as well. Towards those students, the schools considered that they violate the school's disciplinary enforcement; consequently, they are dismissed from the school. The school said that they have defamed the school' reputation as well as tend to bring bad impact on other students. Some schools, however, allow them to stay studying at school by demanding strong commitment of their parents to keep their eyes on them. Meanwhile, some others allow them to study with highly particular attention and more intense communication with their parents.

114

Keywords: *children in conflict with the law, response, school, disciplinary enforcement*

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam istilah internasional disebut dengan *children in conflict with the law*, merupakan istilah yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa hingga akhir 2011 terdapat sebanyak 7.000 lebih ABH disidang di pengadilan, dan 90 persen diantaranya diproses pidana dan harus masuk lapas anak (Kompas, 20 Januari 2012). Sementara itu, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2012 mencapai sebanyak 5.358 anak (Profil Anak Indonesia 2013).

Dalam Konvensi Hak Anak, ABH dikategorikan sebagai anak dalam kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Hal ini disebabkan ABH rentan menjadi korban tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan ditahan. Kematian seorang anak di tahanan kepolisian (Tulungagung dan Surabaya) dan dua anak kakak beradik 14 tahun dan 17 tahun yang meninggal di tahanan kepolisian sektor (Polsek) Sijunjung Sumatera Barat, serta anak yang menemukan sandal jepit dipukuli oleh anggota brimob dan dinyatakan bersalah melakukan pencurian di Palu (Kompas, 20 Januari 2012), merupakan bukti masih adanya kekerasan yang dialami oleh ABH. Kerentanan ABH tersebut telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang ada. Jika pada UU No. 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

belum secara tegas mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif bagi ABH, namun pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara tegas mengamanahkannya. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, wajib diupayakan *diversi*.

Berdasarkan data yang dilaporkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas bahwa jumlah ABH pada tahun 2012 sebanyak 39 orang, pada tahun 2013 sebanyak 32 orang dan meningkat menjadi 51 orang pada tahun 2014. Sebagian besar kasus ABH telah diupayakan melalui mekanisme *diversi* untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal dan berakhir dengan pemenjaraan. *Diversi* dilakukan demi kepentingan terbaik anak, agar kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak tersebut akan lebih optimal. Namun demikian, harapan ini akan dapat dicapai jika upaya tersebut juga ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh PPT PKBGA Kabupaten Banyumas, bahwa sebagian besar ABH sebagaimana dilaporkan di atas adalah berstatus sebagai pelajar. Berikut ditampilkan data mengenai hal tersebut.

Tabel 1. Jumlah ABH dirinci menurut status pekerjaannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2012 – 2014

No.	Tindak Lanjut	Tahun/Jumlah		
		2012	2013	2014
1.	Pelajar	22	19	36
2.	Buruh/swasta	5	3	9
3.	Pengamen	1	1	-
4.	Tidak bekerja	11	9	6
Jumlah		39	32	51

Sumber: PPT PKBGA Kabupaten Banyumas

Demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, maka ABH terutama bagi yang masih sekolah harus dipastikan bahwa mereka tetap mendapatkan akses untuk melanjutkan sekolahnya. Namun demikian, hal ini akan sangat bergantung pada respons sekolah terhadap anak-anak tersebut. Sekolah maupun guru masih memberikan stigma bagi anak-anak yang menjalani

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

proses peradilan. Sehingga sejumlah sekolah, terutama sekolah favorit lebih mengutamakan reputasi sekolah daripada mempertimbangkan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengeluarkan anak dari sekolah atau meminta anak pindah ke sekolah lain merupakan langkah sekolah dalam mencegah kenakalan di lingkungan sekolah (UNICEF, 2009). Pada titik inilah, kajian mengenai bagaimanakah respons sekolah terhadap siswanya yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Banyumas sangat penting untuk dikaji. Dalam rangka mengetahui respons sekolah tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menjelaskan: 1) pemahaman sekolah terhadap hak-hak anak; 2) pandangan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum, dan 3) sikap dan tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam (Denzin dan Lincoln, 2009) tentang pemahaman sekolah terhadap hak-hak anak; pandangan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum, dan sikap dan tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari guru bimbingan konseling dan kepala sekolah di beberapa sekolah SD/SMP/SMA/ sederajat, dimana siswanya pernah tercatat sebagai ABH di kantor kepolisian di wilayah Kabupaten Banyumas, polisi, ABH, dan relawan pendamping dari PPT PKBGA. Pengumpulan data dilakukan sejak Mei – awal September 2015 dengan cara *indept-interview* (Moleong, 1990), *focused group discussion* (FGD) dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1988)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Sekolah terhadap Hak-Hak Anak

Schutz (1970) menjelaskan bahwa setiap individu berinteraksi dengan dunia dengan "bekal pengetahuan" yang terdiri atas konstruk-konstruk dan kategori-kategori "umum". Bekal pengetahuan adalah satu-satunya sumber yang memungkinkan setiap individu untuk menginterpretasi pengalaman, memahami maksud dan motivasi individu lain, memperoleh pemahaman intersubjektif dan pada akhirnya mengupayakan tindakan. Mendasarkan pada

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015
Purwokerto

pemikiran Schutz tersebut dapat dijelaskan bahwa pemahaman guru terhadap anak dengan segala aspeknya (termasuk hak-hak anak) akan mempengaruhi cara mereka membangun relasi dan komunikasi dengan anak, serta cara bertindak dan mengambil keputusan untuk anak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah²⁸. Adapun hak dasar anak meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi²⁹. Keempat hak dasar anak tersebut dijabarkan ke dalam 5 kluster hak anak, yaitu 1) hak sipil dan kemerdekaan; 2) hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar; 4) hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; 5) hak untuk mendapatkan perlindungan khusus (Konvensi Hak Anak). Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengetahuan dan pemahaman para guru tentang hak dasar anak masih sangat minim, sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan berikut ini:

".... anak itu harus mendapatkan kasih sayang.." (Ibu Fa)

"....anak berhak mendapatkan pendidikan.." (Ibu NH)

"....anak walau anak itu nakal harus dilindungi.." (Bp. Pur)

Selanjutnya, ketika ditanya siapa yang semestinya bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak tersebut, semuanya menyatakan bahwa yang pertama dan paling utama bertanggung jawab adalah orang tua. Berikut penuturan para informan:

"....yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak ya orang tua..." (Bp. TBS)

"....anak itu kan waktunya lebih banyak di rumah, di sekolah hanya beberapa jam. Yang paling utama memenuhi hak anak ya semestinya orang tua.." (Ibu Kr)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para guru belum memahami jika sejatinya tanggung jawab pemenuhan hak anak adalah menjadi tanggung jawab bersama (*collective responsibility*) sebagaimana amanah undang-undang. Akibatnya, kepedulian dan kesadaran

²⁸ Angka 12, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

guru terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak juga rendah. Sebagai contoh, guru atau sekolah lebih mengedepankan hukuman bagi siswa yang terpaksa mencuri daripada mencari solusi. Dalam banyak kasus, siswa tersebut terpaksa mencuri karena telah ditelantarkan oleh orang tuanya, sementara setiap hari mereka harus melihat teman-temannya jajan di kantin sekolah. Kasus tersebut semata-mata dilihat sebagai kesalahan orang tua, sehingga sekolah tidak perlu merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh siswanya.

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa tidak satu pun guru yang menjadi informan pernah membaca undang-undang dan peraturan lainnya terkait perlindungan anak. Mereka juga menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai KHA. Dari 4.389 orang guru yang ada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga pertengahan tahun 2015 baru 240 orang guru (5,47%) yang pernah mengikuti pelatihan tentang Konvensi Hak Anak³⁰.

B. Pandangan Sekolah terhadap Anak (Siswa) yang Berkonflik dengan Hukum

Salah seorang penganut pemikiran Mead, Herbert Blumer menjelaskan bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. Makna yang dipunyai tersebut muncul dari interaksi sosial di antara dan antarindividu. Makna-makna itu ditetapkan dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif. Makna-makna digunakan dan direvisi sebagai alat yang menuntun dan membentuk tindakan (*dalam Schwandt, 1997*). Melalui pemikiran Blumer ini dapat dijelaskan bahwa tindakan sekolah (guru) terhadap siswa yang berkonflik dengan hukum sangat bergantung dari bagaimana guru memandang dan memberi makna terhadap siswa tersebut. Pengetahuan (*stock of knowledge*) yang dimiliki para guru tentang anak dan hak-haknya turut membentuk bagaimana guru memberi makna terhadap anak tersebut.

Para guru menyatakan bahwa ABH disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, salah dalam memilih teman, dan lingkungan yang buruk. Berikut penuturan para informan:

"...kenapa anak-anak itu bisa seperti itu, ya umumnya karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Orang tua terlalu sibuk dan kurang melakukan pengawasan..."(Ibu SA)

³⁰ Wawancara dengan Kasubid Perlindungan Anak, Bapermas PKB Kabupaten Banyumas, 4 September 2015

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015
Purwokerto

"...mereka itu salah dalam memilih teman dan bergaul, sehingga ya terpengaruh oleh teman-temannya yang tidak baik..." (Bp. Pur)

"...anak-anak itu tinggal di lingkungan yang kurang baik. Pemudanya banyak yang menganggur, suka mabuk-mabukan, nongrong-nongkrong sampai malam..akhirnya ya anak itu ikut-ikut.. (Ibu NH)

Keluarga dan lingkungan yang buruk memang turut andil dalam membentuk perilaku yang menyimpang pada diri anak-anak dan remaja. keluarga yang patologis selalu membuahkan masalah psikologis, konflik terbuka dan tertutup, serta menjadi penyebab utama timbulnya *juvenile delinquency* (Kartono, 1992). Menurut Rosenbaum, Moran, Chang & Pettit, terganggunya atau ketiadaan penerapan pemberian dukungan keluarga dan praktek manajemen oleh orang tua secara konsisten berhubungan dengan tingkah laku antisosial oleh anak-anak dan remaja (dalam Kurniasari, 2009). Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya (*cultural transmission*). Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu *deviant subculture* – suatu subkebudayaan menyimpang (Sutherland, dalam Clinard, 1963).

Para guru tidak menyadari bahwa sesungguhnya sekolah secara perlahan telah melakukan apa yang disebut dengan kekerasan simbolik (Bourdieu & Passeron, 1997). Sekolah mensosialisasikan habitus-habitus atau budaya kelas atas secara terus-menerus dengan berbagai cara. Materi dan buku-buku pelajaran banyak menyajikan dan menggambarkan budaya kelas atas. Kebiasaan-kebiasaan siswa dari kelas atas setiap hari diajarkan di sekolah, seperti pesta ulang tahun, kendaraan bermotor, les privat, dll. Dalam pemikiran Merton, bahwa struktur sosial semacam itu menghasilkan tekanan ke arah *anomie (strain toward anomie)* dan perilaku menyimpang (dalam Sunarto, 1998). Akibatnya, anak dari kelas bawah harus mencuri uang agar bisa membeli hadiah dan datang ke pesta ulang tahun temannya. Anak tidak mau sekolah jika tidak dibelikan motor oleh orang tuanya, dan lain sebagainya.

Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa ABH adalah produk dari lingkungan (keluarga, masyarakat, sekolah) dan kebijakan yang tidak ramah anak. Anak-anak tersebut semestinya tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, lebih dari itu mereka sesungguhnya adalah korban. Cara pandang guru yang menempatkan ABH sebagai korban,

Prosiding Seminar Nasional

"Pembangunan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

akan mendorong mereka untuk lebih berpihak pada anak. Berikut penuturan guru terkait hal tersebut:

101
"...anak-anak harusnya tidak perlu dilaporkan ke Polsek. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengerti kalau mengambil skrup (baut) di bantalan rel kereta api itu bisa membahayakan kereta api dan penumpangnya. Pihak KAI juga tidak pernah mensosialisasikan tentang hal itu. Anak-anak itu Cuma iseng. Barangnya juga masih di simpan di tas untuk mainan, tidak sengaja mencurinya untuk dijual..." (Ibu NH)

Sebaliknya, guru yang memposisikan ABH semata-mata sebagai pelaku kejahatan cenderung bersikap menghukum dan tidak membela kepentingan terbaik anak. Salah seorang guru bernama Bp.Wr menjelaskan:

89
"...ketika anak pertama kali masuk ke sekolah kami, sejak awal sudah diberitahu tentang tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Jadi setiap siswa sudah tahu setiap point pelanggaran dan apa sanksinya. Hal itu untuk mengantisipasi supaya sejak awal anak tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Jika ada siswa ada yang melanggar ya tahu bagaimana konsekuensinya..."
116

37
Proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural. Sehingga, dalam perkembangannya tidak semua anak tumbuh dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka sekolah dituntut untuk menyediakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-educatif melalui layanan bimbingan dan konseling³¹.
100
16

C. Sikap dan Tindakan Pendisiplinan yang Dilakukan Sekolah terhadap Anak (Siswa) yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Foucault, disiplin merupakan konsep kunci untuk memahami teknik kekuasaan. Teknik kekuasaan mau membidik kepatuhan, dan kepatuhan itu mempunyai

7
³¹ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

makna kongkrit. Bagaimana secara riil dibentuk subyek-subyek yang patuh (Haryatmoko, 2014). Martono (2014) menjelaskan, mekanisme pendisiplinan yang dilakukan oleh sekolah antara lain melalui standarisasi perilaku siswa yang diwujudkan dalam bentuk tata tertib sekolah. Melalui tata tertib ini sekolah dapat dengan mudah mengklasifikasikan "mana siswa yang disiplin dan mana yang tidak disiplin", mana siswa yang patuh, mana yang membangkang, mana siswa yang layak mendapat pujian, dan mana siswa yang layak mendapat hukuman. Melalui tata tertib sekolah, semua warga sekolah (guru, siswa, orang tua siswa) diarahkan pada suatu definisi yang sama terhadap ABH, yaitu siswa yang tidak disiplin, membangkang dan layak untuk mendapatkan hukuman. Terkait dengan hal tersebut, sikap dan tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap ABH adalah:

Pertama, sebagian sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari sekolah. Alasannya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan kenakalan terhadap anak yang lain. Berikut penuturan mereka:

"...tindakan anak tsb sudah mencemarkan nama sekolah. Siswa yang lain sudah pada tahu. Bahkan wartawan juga sudah ada yang datang menanyakan hal itu. Kalau tidak kami keluarkan, akan menimbulkan preseden buruk, sekolah dianggap tidak tegas.." (Bp. TBS)

"....kalau kami tidak mengeluarkan, kami khawatir perilaku buruknya akan menular pada siswa yang lain. Tidak hanya guru, tapi orang tua siswa juga takut anaknya akan terpengaruh negatif. Sehingga sekolah juga ditekan oleh orang tua siswa untuk mengeluarkan anak tsb dari sekolah ini.." (Ibu Id)

Kedua, beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Salah seorang guru mengungkapkan:

"...melalui rapat yang melibatkan guru BK, guru kelas, guru kesiswaan dan kepala sekolah, kami memutuskan untuk memberi kesempatan anak itu untuk sekolah tetapi harus ada jaminan dari orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih ketat, orang tua harus membuat surat pernyataan di atas meterai.." (Ibu NH)

Ketiga, beberapa sekolah lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya. Berikut penuturan salah seorang guru terkait hal tersebut:

Prosiding Seminar Nasional

"Pembangunan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

"...anak yang bermasalah dengan hukum itu pada dasarnya memiliki masalah tertentu dalam keluarganya. Sehingga kami perlu memberikan perhatian khusus terhadap anak tersebut. Mereka sesungguhnya hanya butuh orang lain lebih perhatian dan menyayanginya. Kami juga bekerjasama dengan orang tuanya dan sering menjalin komunikasi untuk melihat perilaku anak itu ketika di rumah.." (Ibu Fa).

"...Siswa kami pernah dilaporkan ke Polisi karena terlibat tindak pencurian motor. Kami mencoba mendalami alasan anak tersebut mencuri motor dan bagaimana latar belakang keluarganya. Kami tidak langsung menghukum apalagi mengeluarkan anak dari sekolah. anak tetap kami minta untuk sekolah.." (Bp. Im)

Mengeluarkan anak dari sekolah menunjukkan bahwa sekolah lebih mengedepankan citra sekolah dari pada berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sekolah seharusnya menjadi menjadi wahana untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia. Pendidikan yang membebaskan, memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasannya, sehingga menjadi orang realis dan kreatif (Wahono, 2001).

KESIMPULAN

Respons sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum ditunjukkan melalui sikap dan tindakan pendisiplinan yang diambil. Pertama, sebagian sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari sekolah. Alasannya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan kenakalan terhadap anak yang lain. Kedua, beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Ketiga, beberapa sekolah lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya.

Sikap dan tindakan pendisiplinan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman guru terhadap hak-hak anak. Oleh karenanya, kedepan perlu terus diupayakan berbagai program penguatan akan KHA bagi para guru di sekolah. Harapannya, akan terwujud sekolah yang ramah anak.

Prosiding Seminar Nasional

"Pembangunan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015
Purwokerto

DAFTAR PUSTAKA

- 56 Bourdieu, P., & Passeron, J.C. 1997. *Reproduction in Education, Society, and Culture*. SAGE Publications. London
- 65 Clinard, Marshall B., 1963. *Sociology of Deviant Behavior*. Holt, Rinehart, and Winston, Inc. USA
- 13 Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Editors). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno, dkk., Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- 59 Haryatmoko. 2014. *Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*. Makalah Lokakarya Pemikiran Foucault, Kajian Budaya Media. Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta
- 4 Kartono, Kartini, 1992. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Cetakan kedua. Rajawali. Jakarta
- 99 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2013. *Profil Anak Indonesia 2013*. Jakarta
- Kompas. 2012. Saat 90 Persen Masuk ke Lapas. Rubrik Fokus: Anak dan Hukum, 20 Januari 2012. Jakarta
- 21 Kurniasari, Alit, dkk., 2009. *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP): Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal*. Cetakan 1 P3KS Press, Jakarta
- 51 Martono, Nanang. 2014. *Dominasi Kekuasaan dalam Pendidikan: Tesis Bourdieu dan Foucault tentang Pendidikan*. Jurnal Interaksi Vol.8 No. 1. hal 28 - 39
- 2 Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman, 1988. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Seventh Printing, Sage Publications, Beverly Hills-London-New Delhi
- Moleong, Lexy J., 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- 45 Schutz, Alfred. 1970. *On Phenomenology and Social Relations*. Chicago. University of Chicago Press
- Schwandt, Thomas A. 2013. *Pendekatan Konstruktivis-Interpretivis dalam Penelitian Manusia*, dalam Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Editors). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno, dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- 44 Sunarto, Kamanto. 1998. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-2, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20
November 2015
Purwokerto

Unicef dan Pusat Kajian Kriminolog FISIP Universitas Indonesia. 2009. Analisis Situasi
Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. Jakarta

Wahono, Francis. 2001. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Cetakan
I. Insist Press-Cindelas-Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Respons sekolah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	es.scribd.com Internet Source	3%
2	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
3	www.neliti.com Internet Source	1%
4	download.atiantis-press.com Internet Source	1%
5	bapendik.unsoed.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	akbidbup.ac.id Internet Source	<1%
9	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1%

10	doaj.org Internet Source	<1 %
11	akademik.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
13	e-repository.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
14	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
15	www.lppslh.or.id Internet Source	<1 %
16	goeroendesofiles.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	komunikasi.fisip.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
18	123dok.com Internet Source	<1 %
19	sipil.ft.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.jurnalmedika.com Internet Source	<1 %
21	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

22	apssi-sosiologi.org Internet Source	<1 %
23	ajiyogya.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	lipi.go.id Internet Source	<1 %
25	repository.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.ekonomiuntagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
27	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
28	www.kaltim.go.id Internet Source	<1 %
29	blackkkamjong.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
31	biologi.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
32	id.scribd.com Internet Source	<1 %
33	jp.feb.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %

34	jurnal.fp.uns.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.omniakuatika.net Internet Source	<1 %
36	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
37	lestarastri.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
39	www.jurnal.lppm.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
40	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
41	core.ac.uk Internet Source	<1 %
42	lppm.stkippacitan.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
44	aldinotugaskuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	archive.org Internet Source	<1 %

46	blog.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
47	fikes.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
48	journal.uny.ac.id Internet Source	<1 %
49	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
50	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
51	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
52	mik.binus.ac.id Internet Source	<1 %
53	mip.faperta.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
54	v1.faperta.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
55	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
56	www.emeraldinsight.com Internet Source	<1 %
57	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %

58	alliyabenings.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
60	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
61	jurnal.stieww.ac.id Internet Source	<1 %
62	library.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
63	www.apalebluedot.co.za Internet Source	<1 %
64	www.scribd.com Internet Source	<1 %
65	baixardoc.com Internet Source	<1 %
66	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
67	ebookinga.com Internet Source	<1 %
68	iris1103.uns.ac.id Internet Source	<1 %
69	media.neliti.com Internet Source	<1 %

70	repository.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
71	rumahkita2010.wordpress.com Internet Source	<1 %
72	www.rizkiwahyudi.web.id Internet Source	<1 %
73	"Book of Abstracts International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security 2017 (AEFS) 2017", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018 Publication	<1 %
74	Tri Pujiana, Kordiyana K Rangga, Yuniar A Syarief, Abdul Mutolib. "Strategi Pengembangan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Tulang Bawang Barat", Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian, 2020 Publication	<1 %
75	bundghaz.blogspot.com Internet Source	<1 %
76	cepabay.blogspot.com Internet Source	<1 %
77	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
78	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %

79	fib.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
80	fmipa.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
81	lppm.undip.ac.id Internet Source	<1 %
82	nananghusairi.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
84	repository.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
86	republika.co.id Internet Source	<1 %
87	sejarah.fkip.unila.ac.id Internet Source	<1 %
88	sersc.org Internet Source	<1 %
89	smkn2bawang.sch.id Internet Source	<1 %
90	teknikmesinpoltan.blogspot.com Internet Source	<1 %

91	www.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
92	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
93	e-sakip.kaltaraprov.go.id Internet Source	<1 %
94	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
95	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
96	ibrahimy.ac.id Internet Source	<1 %
97	lib.geo.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
98	ojs.serambimekkah.ac.id Internet Source	<1 %
99	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
100	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
101	stressiology.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

103	w3.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
104	yayasan-samin.org Internet Source	<1 %
105	bamboedoea.com Internet Source	<1 %
106	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
107	dinarek.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
108	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
109	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
110	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
111	library.uns.ac.id Internet Source	<1 %
112	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
113	Eman Sutrisna, Eman Sutrisna, Nur Signa Aini Gumilas, Mus Topa, Evy Sulistyoningrum. "Comparison of the Effect of Ethanol Extracts of Phaleria macrocarpa (scheff.Boerl) Fruit	<1 %

and Metformin on the Kidney Function of
Hyperglycaemic Rat Models", Herb-Medicine
Journal, 2020

Publication

114 Sharyn Graham Davies, Jazz Robson. "Juvenile
(In)justice: Children in Conflict with the Law in
Indonesia", Asia-Pacific Journal on Human
Rights and the Law, 2016

Publication

<1 %

115 repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

116 repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

117 jurnal-iktiologi.org

Internet Source

<1 %

118 moam.info

Internet Source

<1 %

119 rentalcreativ.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On